

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja Pemerintah Daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa Pemerintah Daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (UU No.23 Tahun 2014).

Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Bastian 2001:330). Masyarakat seharusnya kritis dan sudah selayaknya melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah untuk menilai akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara Pemerintah Daerah memberikan Pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah tersusun anggaran.

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Pemangku kepentingan itu antara lain adalah masyarakat sebagai pembayar pajak daerah, pemberi dana bantuan (donor), investor, masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah, karyawan/ pegawai Pemda, penyedia barang atau jasa (pelaku bisnis daerah), DPRD, masyarakat pemilih, badan pengawas dan advokasi, lembaga perating, para analisis ekonomi dan keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga – lembaga internasional, dan manajemen sendiri.

Kinerja penganggaran (*Performance budget*) pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Mardiasmo (2007) juga menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga yang bersifat *profit oriented* maupun lembaga yang bersifat *non profit oriented*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan (*incremental budget*) dimana masing – masing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepresikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis (Mahmudi 2016:90).

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Di dalam penelitian kinerja keuangan terdapat komponen – komponen yang terkait yang diberlakukan menurut Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016) antara lain berdasarkan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas antara lain :

1. Rasio Lancar
2. Rasio Utang Terhadap Ekuitas
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
4. Rasio Efektivitas PAD
5. Rasio Efisiensi PAD
6. Pertumbuhan Arus Kas

Tujuan umum laporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan posisi keuangan neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP Nomor 1 Par:9).

Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian ketiadaan laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lemahnya akuntabilitas menunjukkan lemahnya sistem yang berimbas pada membudayanya berbagai penyelewengan seperti korupsi yang sistematis. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang kerap terjadi di instansi sektor publik, salah satu caranya adalah dengan cara membudayakan prinsip akuntabilitas yang berarti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan yang dianggarkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya**” yang akan diamati di Kota Surabaya (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). Pengukuran kinerja karyawan ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Penelitian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan aspek keuangan dilakukan dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Pemerintah daerah, dengan menggunakan data terbaru dan objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan rasio keuangan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan pihak yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan untuk berfikir kritis tentang pentingnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Surabaya yang diukur menggunakan rasio keuangan, serta sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1).

2. Bagi Pihak Kampus

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian sejenis dan menambah wawasan di perpustakaan tentang pentingnya kinerja pemerintah Kota Surabaya.

3. Bagi Pemerintahan Daerah

Diharapkan mampu menambah informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Surabaya dan menjadi masukan agar kinerja Daerah lebih baik lagi.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta wawasan masyarakat tentang kinerja keuangan Kota Surabaya dan menjadi pembanding dengan penelitian terdahulu dan menjadi sumbangan pemikiran bagi semua yang membaca.